

DAFTAR DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Achmad Chomzah, Ali. *Hukum Pertanahan*, Jakarta. Prestasi Pustaka. 2002.

Aini Setiawati, Nur. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Pengasa, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*, Yogyakarta. STPN Press. 2011.

Al Rashid, Harun. *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah*. Jakarta. Ghala Indonesia. 1987.

Arikunto, Suharsini. *Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2006.

Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta. 1996.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta. Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Harsono, Boedi. *Undang-Undang Pokok Agraria Bagian Pertama*, Jakarta. Djambatan. 1971.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta. Djambatan. 2003.

Jalil, Husni. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*, Makassar. CV Social Politic Genius (SIGn). 2017.

Josef Sembiring, Jimmy. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta. Visimedia. 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta. Liberty. 1985.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2004.

Muhammad Hikam, A.S. *Kewarganegaraan dan Agenda Demokratisasi, Dalam Malian S dan Marzuki S, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Azasi Manusia*, Yogyakarta. UII Press. 2002.

Munsyarief, *Menuju Kepastian Hukum atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta. Penerbit Ombak. 2013

Noor, Aslan. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung. Mandar Maju. 2006.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta. Balai Buku Ichtiar. 1962.

Parlindungan, AP. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung. Mandar Maju. 1991.

Poerwokusumo, Soedarisman. *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1985

Ruchiyat, Eddy. *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung. Armico. 1984.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2007.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada . 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Universitas Indonesia. 2008.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Rajawali Pres. 2010.

Soemardjan, Selo. *Perubahan sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1991

Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta. Kompas. 2006

Sumardjono, Maria S.W. *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan Bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, Jakarta. Kompas. 2007.

Sumardjono, Maria S.7W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta. Kompas. 2008

Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. 2014.

Sumardjono, Maria SW. *Bahan Kuliah : Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT Rajagrafindo Persaha. 2006.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

Thalib, Hambali. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan, Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta. Prenada Media Group. 2009.

Tim ICCE. *Demokrasi, Hak Azasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta. ICCE. UIN Syarif Hidayatullah. 2003.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta. ELSAM dan HUMA. 2002

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

Abdurrahman, Alif. "Konsistensi Penerapan UU No. 5 Tahun 1960 Terkait Dengan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi Di Yogyakarta". *Jurnal Gema Keadilan*. 6 (2), 2019.

Agraristanti, Westi. "Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Warga Negara Indonesia Non Pribumi Setelah Berlakunya Undang Undang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Tesis Program Studi Magister Kenotariatan. 2009.

Ardaya Gharini, Gita. "Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia," Repository UNPAD. 2020.

Husni Maulana, Afan. "Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* Vol. 1, No. 2, 2021.

Lestari, Ratih. "Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Diskriminasi atau Diskriminasi Positif, Vol. 48, No. 1. Maret, 2018.

Nurhidayati dan Sugiyah. "Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Binamulia Hukum*. Universitas Bina Sarana Informatika. Juli, 2019.

Rusta, Andri. "Jurnal Perempuan", Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan. 2013.

Sito Sekar Vetri, Tihara. "Problematisasi Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi Di Yogyakarta", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2016.

Sumaryadi, Bambang. "Status Hak Milik Perseorangan Atas Tanah Dan Hak Lain Yang Sejenis Menurut Hukum Adat Sebelum Dan Sesudah Berlakunya UUPA Di Propinsi DIY", Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 1990.

Yudarianto, Satrio. "Kedudukan Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 Dalam Perundang-Undangan Indonesia Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Bantul", Tesis Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2007.

Yusup Anwar, Mohammad. "Kajian Hukum Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.K/898/I/A/1975 Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Pancasila Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik". *Jurnal Lex Certa* Vol. 5 No. 1, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 164 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaran Negara No. 170 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 Perihal Penyeragaman Kebijakan Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi. tanggal 5 Maret 1975.

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY.

Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 1984. Lembaran Daerah Tahun 1984 No. 34.

D. Internet

Anonymous, "Wajib Tahu! Ini Perbedaan Peraturan, Aturan Kebijakan dan Keputusan yang Wajib Dipahami", <https://www.reqnews.com/fokus/36717/wajib-tahu-ini-perbedaan-peraturan-aturan-kebijakan-dan-keputusan-yang-wajib-dipahami>, (diakses tanggal 14 Februari 2022).

Dwi Herawati S, "Perbedaan Aturan dan Kebijakan", <https://www.brankspedia.com/2021/02/perbedaan-aturan-dan-kebijakan.html>, (diakses tanggal 14 Februari 2022).

Markus Yuwono, Mengapa Warga Nonpribumi Tidak Boleh Punya Tanah di Jogja?

<https://regional.kompas.com/read/2018/03/01/11395741/mengapa-warga-nonpribumi-tidak-boleh-punya-tanah-di-jogja?page=all> di published pada 1 Maret 2018, (diakses pada tanggal 5 Juli 2022).

R. Indra, "Kompetensi Relatif & Absolut Pengadilan dalam Perkara Perdata", <https://doktorhukum.com/kompetensi-relatif-absolut-pengadilan-dalam-perkara-perdata/>, (diakses tanggal 15 Februari 2022).

Sunano, "Ini Penyebab WNI Keturunan Tionghoa di Yogya Tak Bisa Punya Tanah," <https://www.republika.co.id/berita/p4v0mx385/ini-penyebab-wniketurunan-di-yogya-tak-bisa-punya-tanah>, di published pada tanggal 1 Maret 2018. di akses 5 Juli 2022.

valerieputra653, Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli (Umum), <https://brainly.co.id/tugas/16393051>, (diakses tanggal 13 Juni 2022).

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51719/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 13 Juni 2022).

<http://yogyakarta.bps.go.id/> (Diakses tanggal 17 Juni 2022).